

# PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM MELAKSANAKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAMPUNG AMBAI II DISTRIK AMBAI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Lina Andayani

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik  
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura  
Jl. Raya Sentani-Padang Bulan, Jayapura  
[Lina.andayanigemini@gmail.com](mailto:Lina.andayanigemini@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Peran Kepala Kampung Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Kampung**”. Kemampuan Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugas terutama menjalankan roda pemerintahan tidak terlaksana dengan baik. Rumusan masalah penelitian yakni Bagaimana peran kepala kampung dalam melaksanakan tertib administrasi kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kampung., Dalam Meningkatkan Peran Kepala Desa dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Desa Ambai II Distrik Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam peran Kepala Desa dalam melaksanakan tertib administrasi yang dilakukan di Desa Ambai II tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan administratif yang dimiliki oleh kepala Kampung sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kampung diharapkan harus selalu berkewajiban mendampingi semua kebijakan yang dibuat maupun pelaksanaan pemerintahan Kampung Ambai II Distrik Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kata kunci : *Peran, Kepala Kampung, Tertib Administrasi, Pemerintahan,*

## ABSTRACT

Research this entitled “**Role the Village Head In Implementation Orderly Government Administration**”. Capability Village Head in implementation task especially start wheel not run with good. Problem researcher that is how role village head in implementation orderly government administration. This research aims to knowing about implementation Government Administration Village and goverment In improving the role Village Head in implementation orderly administration Village II District Ambai Yapen Island. Reseachers now make use of Method qualitative.

The result showed that the Implementation Government Administration Village in role of village head in implementation the orderly administration performed at Village Ambai II not working well. This matter caused by less administrative knowledge which are owned by village head so that affect the quality service to the society. Village Head expect must always have the duty of accompany all duty thing made though implementation government Village II Yapen Island.

Keywords : *Role Village Head, Orderly Government Administration*

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat di Desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat. Pengertian tentang pemerintah Desa di dalam Undang – undang ini terdapat dalam pasal 25 yang bunyinya : “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat satu (1) Undang – undang ini disebutkan “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pengertian tentang Desa tersebut sudah jelas disebutkan bahwa desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan wilayahnya.

Tepatlah kiranya jika wilayah kampung menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas Pemerintahan dan Pembangunan mengingat Pemerintahan Kampung merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek – aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas – tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek – aspek lainnya.

Administasi Kampung adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Kampung pada buku Administrasi Desa. Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa.

Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Kampung perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi.

Kepala Kampung berwenang menyelenggarakan Administrasi Kampung. Kepala Kampung melaksanakan administrasi kampung dibantu Aparat Kampung. Administrasi Kampung dilaksanakan dalam rangka : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan administrasi Kampung meliputi : Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi lainnya.

Hal tersebut sangat penting karena Pemerintah Kampung beserta Aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya, karena itu peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat kampung yang benar – benar mampu dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan Aparat Kampung yang juga disertai tugas di bidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organisasi pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintahan distrik yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan yang menyeluruh. Dengan demikian Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berangkat dari pemikiran tersebut diatas, dapat dikaitkan dengan kondisi riil dimana Aparat Kampung Ambai II, Distrik Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai tempat penelitian ini, menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Kampung Ambai II dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal

(sumbernya : Sekretaris Kampung Ambai II). Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas – tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.

Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut diatas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat kampung sebagai penyelenggara yang belum optimal. Dalam konteks penyelenggara pemerintah kampung yang terpenting adalah bagaimana pemerintah kampung mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat kampungnya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan kampung dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan – urusan pemerintahan tersebut.

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan, diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintahan kampung. Hal ini perlu diteliti atau dikaji lebih mendalam untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Kampung Dalam Melaksanakan tertib Administrasi Pemerintahan Kampung Ambai II, Distrik Ambai, Kabupaten Yapen. Untuk itu Tujuan Penelitian adalah mendeskripsikan Peranan Kepala Kampung dan Aparat Kampung dalam melaksanakan Administrasi Kampung di Kampung Ambai II Distrik Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen.

#### a. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya dan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (soeharto, 2002, 1984: 237). Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002, 243). Pemerintah Kampung memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah kampung adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam Melaksanakan Tugas Administrasi Pemerintahan Kampung sesuai Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Kampung.

**Sedangkan indikator dari Teori Peran dilihat dari Pendekatan Perilaku (*Behavioral Approach*) yaitu** perilaku atau hubungan Kepala Kampung dan aparat kampung dalam melaksanakan roda pemerintahan kampung yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan Kampung Ambai II Distrik Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pemerintah Kampung memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah kampung adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik. Upaya untuk meningkatkan pemahaman Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam Melaksanakan Tugas Administrasi Pemerintahan Kampung sesuai Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Kampung.

#### b. Administrasi Pemerintahan Kampung

Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kampung merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan pembangunan nasional. Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah kampung adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengurus, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaannya oleh organisasi terendah langsung di bawah Distrik.

Indikator dari Administrasi Pemerintahan Kampung terdiri dari :

## 1. Akuntabilitas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan kampung guna menyusun sumber data dan informasi dalam perencanaan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan masyarakat.

## 2. Fungsi Kontrol

Terhadap perangkat kampung dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kebebasan informasi dan perumusan kebijakan pemerintahan kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan Kampung.

## IMETODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses mencapai sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama menggunakan metode ilmiah serta aturan – aturan yang berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian, yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan.

Penelitian ini menggunakan **Metode pendekatan kualitatif**. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan lokasi penelitian bertempat di Kampung Ambai II Ditrik Ambai.

### Sumber Data

Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Ulber Silalahi (2012). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan sekunder sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013).

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Data primer berasal dari informan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku – buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini..

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi tentang variabel – variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Setelah sumber data pada tahap awal ditetapkan, selanjutnya peneliti kualitatif melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data data dibagi atas tiga langkah : (1) menentukan batasan penelitian; (2) mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan bahan – bahan yang dapat dilihat; (3) membangun dan menyusun langkah untuk mengumpulkan informasi.

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktifitas program, proses dan peserta.

#### 2. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan metode wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, Burhan Bungin (2007).

#### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari catatan – catatan publik tentang hal – hal penting yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa buku – buku, majalah, dokumen, peraturan – peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

### **Teknik Analisis Data**

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan..

#### **2. Penyajian Data**

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data – data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian – penyajian tersebut.

#### **3. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan**

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAHAN**

### **1. Administrasi Pemerintahan Kampung**

Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan kampung untuk mencapai tujuan pemerintahan, seperti antara lain, dalam menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah kampung tersebut, tidak terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan tugas sebaik – baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing – masing aparat. Namun dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan kampung, Kepala Kampung tidak bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kampung Ambai II sebagai berikut :

*“Selama ini tugas dan tanggung jawab diberikan kepada sekretaris kampung untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan Kampung, padahal sebenarnya semua tanggung jawab dan roda pemerintahan Kampung Ambai II ada di tangan Kepala Kampung, dan beliau tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan masyarakat Kampung Ambai II dengan baik.” (Sekretaris Kampung Ambai II Bapak Septinus Karubaba).*

Sejalan dengan pendapat Sekretaris Kampung Ambai II, hasil wawancara bersama Kepala Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) mengatakan hal yang sama sebagai berikut :

*“Selama ini kegiatan – kegiatan yang di laksanakan di kampung, Bapak kepala kampung tidak pernah hadir dan banyak keputusan – keputusan yang seharusnya di pertanggungjawabkan oleh bapak kepala kampung tetapi diserahkan kepada sekretaris dan dalam pelaksanaan roda pemerintahan kampung, Kepala kampung tidak laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.” (Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Ambai II Bapak Ishak Waromi).*

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disampaikan bahwa peran Kepala Kampung dalam melaksanakan tertib administrasi, menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Peran Kepala Kampung Ambai II dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi kampung Ambai II tidak berjalan dengan baik, dengan adanya beberapa faktor – faktor penghambat diantaranya peran kepala kampung sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung tidak berjalan dengan baik dan semua aktifitas dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Sekretaris Kampung.

Dalam kegiatan pengambilan data penduduk kampung tahun 2016/2017 Kampung Ambai II, kinerja kepala kampung dalam merangkul masyarakat juga tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kampung dikarenakan kepala kampung selama masa jabatan pada tahun 2017 tidak pernah hadir dan bertatap muka langsung bersama aparat kampung dan masyarakat kampung.

Sangat disadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan kampung untuk itu yang menjadi keharusan bagi kepala kampung dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan ketrampilan mengelola organisasi pemerintahan kampung termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas – tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Fasilitas kerja merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan segala kegiatan kerja dilakukan oleh pemerintah kampung dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung kepada masyarakat selain sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan kampung juga harus memenuhi persyaratan yaitu harus memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang beraktivitas didalamnya, hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja aparat kampung dalam melaksanakannya tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan optimalisasi kualitas pelayanan kepada masyarakat Kampung Ambai II Distrik Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen.

#### **a. Fungsi Akuntabilitas**

Kepemimpinan pada dekade terakhir ini dituntut untuk lebih memfokuskan bagaimana peran pemimpin dan tanggung jawab yang di emban kepala kampung, menyadari hal tersebut Kepala kampung sebagai pemimpin organisasi administrasi sesuai ketentuan perundang – undangan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa.

Tanggung jawab yang di emban Kepala Kampung dalam pelaksanaan penyelenggaraan kampung tidak terlaksana dengan baik dan hasilnya masih minim, seperti yang diungkapkan Sekretaris Kampung Ambai II sebagai berikut :

*“Kepemimpinan kepala kampung berpengaruh terhadap masyarakat dan kalo Bapak kepala Kampung tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan masyarakat, banyak kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan namun tidak terlaksana dengan baik.”(Sekretaris Kampung Ambai II Bapak Septinus Karubaba).*

Selain itu peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat yang pernah menjabat kepala kampung ambai II periode sebelumnya sebagai berikut :

*“Selalu penyeleggaraan pemerintahan kampung dipimpin oleh Sekretaris Kampung, kebijakan – kebijakan yang pernah dilaksanakan kepala kampung hasilnya minim atau tidak terlaksana dengan baik.”(Mantan Kepala Kampung Ambai II Bapak Yohanis Karubaba).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat Kampung beserta masyarakat Kampung Ambai II, peneliti menyimpulkan peran Kepala Kampung dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan Kampung baik perencanaan, pelaksanaan baik pembangunan, pemberdayaan, serta urusan pemerintahan yang tercantum di dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25 ayat tiga (3) tentang tugas dan fungsi Kepala Desa, di Kampung Ambai II Distrik Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlaksana dengan baik.

Salah satu kegiatan pelaksanaan Pembangunan Jembatan Kampung Ambai II tahap I tahun 2016 telah berjalan maksimal namun tahap II tahun 2017 tidak ada petanggungjawaban dari kepala kampung sebagai kepala pemerintahan kampung sehingga pembangunan jembatan kampung tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat kampung Ambai II.

## **b. Fungsi Kontrol ( Pengawasan)**

Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Pemerintahan dalam tatanan pemerintah kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah kampung, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan Keputusan Kepala Kampung. Di kampung dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat kampung. Dengan demikian pemerintah kampung adalah kepala kampung beserta perangkat kampung dan anggota Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Kepala kampung pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat kampung yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Badan Musyawarah Kampung, Kepala Kampung wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok – pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Musyawarah Kampung untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut.

Dalam Fungsi kontrol yang dilakukan oleh BAMUSKAM, peran kepala kampung dalam melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan baik, Seperti Ungkapan Ketua BAMUSKAM sebagai berikut :

*“Saya selaku ketua BAMUSKAM Ambai II, saya bersama Sekretaris dan Anggota BAMUSKAM membantu Sekretaris Kampung untuk menjalankan roda pemerintahan, kami melakukan pengawasan dari setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kampung namun Kepala Kampung tidak pernah turun langsung ke Kampung Ambai II untuk bersama Sekretaris dan Perangkat kampung untuk melaksanakan roda pemerintahan Kampung”.(Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Ambai II Bapak Ishak Waromi).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAMUSKAM , Kampung Ambai II, peneliti menganalisis lebih mendalam terhadap fungsi BAMUSKAM sebagai fungsi pengawasan pelaksanaan pemerintah kampung Ambai II sudah menjalankan apa yang menjadi tugas masyarakat terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan di lapangan Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) menjalankan perannya bersama aparat pemerintah kampung membuat Peraturan Kampung tentang keamanan dan ketertiban yaitu melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat, Pada tahun 2017 peraturan kampung mengenai keamanan dan ketertiban dikeluarkan oleh Kepala Kampung yakni peraturan kampung nomor 3 tahun 2017 peraturan kampung mengenai Keamanan dan Ketertiban. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu dalam proses berjalannya pemerintahan kampung, kepala kampung tidak pernah hadir di kampung guna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

## **2. Kepemimpinan Kepala Kampung**

Kepala Kampung merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kampung. Oleh karena itu kepala kampung beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kampung tergantung dari kinerja Kepala Kampung dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Peranan Kepala Kampung dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan keuangan/anggaran dari pemerintah tingkat atas. Kedudukan Kepala Kampung sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan, memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan memberdayakan

masyarakat sehingga mengharuskan Kepala Kampung mempunyai peran yang bertanggung jawab sehingga program dan tugas pemerintah Kampung dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Pendekatan perilaku dari kepala kampung haruslah dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang diperoleh antara lain: meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan kreatifitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan bersama – sama warga mengingat kegiatan yang dilaksanakan terpusat di kantor kampung. Kesemua ini merupakan hal gerakan kearah kemajuan, dengan demikian erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di lokasi penelitian, peneliti menganalisis sesuai dengan peran kepemimpinan kepala kampung sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di kampung dalam pelayanan kepada masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut tahun 2017. Namun semua kegiatan yang saat ini berjalan di Kampung Ambai II dipimpin langsung oleh Sekretaris Kampung bersama aparat kampung lainnya.

#### **a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kampung**

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kampung dibutuhkan suatu pencatatan yang detail. Registrasi adalah suatu aktivitas pemerintahan dengan maksud untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa dan atau kegiatan yang telah terjadi melalui pencatatan – pencatatan di dalam format yang telah ditetapkan. Namun dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan kampung, Kepala Kampung tidak bertanggung jawab dalam menajalankan roda pemerintahan kampung.

Pelaksanaan pemerintah kampung yang berjalan saat ini dipimpin oleh Sekretaris Kampung bersama perangkat kampung lainnya, namun dengan tidak adanya Kepala Kampung sebagai pemimpin yang diharapkan masyarakat untuk bisa bersama – sama Pemerintah Kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, membina kemasyarakatan dan memberdayakan masyarakat Kampung Ambai II Distrik Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 telah ditetapkan kegiatan – kegiatan administrasi kampung diantaranya perbaikan jembatan kampung ambai II. Kegiatan ini dilaksanakan dari Bulan Maret 2017 hingga 23 Agustus 2017 telah berjalan dengan baik dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan perbaikan jembatan Kampung Ambai II. Namun tidak adanya peran kepala kampung dalam pelaksanaan kegiatan ini hingga selesai.

#### **b. Pelaksanaan Pembangunan**

Pembangunan Kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, Kampung menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Kampung merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kampung dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Kampung diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Kampung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung. Pembangunan Kampung dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Kampung. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Kampung diinformasikan kepada Pemerintah Kampung dan diintegrasikan dengan rencana

Pembangunan Kampung. Masyarakat Kampung berhak mendapat informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Kampung.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan dari berbagai uraian mengenai hasil wawancara dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas kepala kampung, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan terhadap masyarakat Kampung Ambai II, dengan beberapa hambatan tersebut jelas akan mempengaruhi kinerja aparat kampung dalam pelaksanaan tertib administrasi. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung pelaksanaan tertib administrasi Kampung Ambai II. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal – hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat kampung dalam mendukung terlaksananya tertib administrasi kampung Ambai II Distrik Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen.

Fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala Kampung mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah – langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini senada dengan hasil wawancara pada bagian sebelumnya yaitu : kondisi penduduk kampung Ambai II yang cukup beragam harus diperhatikan oleh Kepala Kampung dalam menjalankan tugasnya. Warga yang berprofesi sebagai nelayan dan petani yang menjadi mata pencahariannya sehari – hari mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi tenaga pada setiap kegiatan pemerintahan di kampung tetapi mereka siap memberi bantuan dalam bentuk material. Warga yang menjadi petani dengan kondisi ekonomi lemah dan pendidikan yang rendah pasti sulit sekali untuk diharapkan partisipasinya dalam bentuk ide pikiran dan materi, dan juga dalam pelayanan administrasi pun harus dijelaskan sedetail mungkin tapi mereka semua siap menjalankan apa yang diperintahkan atau diaturkan oleh pemerintah.

Dalam upaya peningkatan tertib administrasi pemerintah kampung membutuhkan sumber daya yang berkualitas, di Kampung Ambai salah satu penghambat dalam terlaksananya kelancaran dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung adalah kurangnya pengetahuan administratif yang dimiliki oleh Kepala Kampung sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peran Kepala Kampung tidak selalu dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maupun musyawarah kampung Ambai II. Pemerintahan yang berjalan saat ini dipimpin oleh Sekretaris Kampung Ambai II dan dibantu aparat kampung lainnya serta Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan memberikan kesimpulan tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Pemerintahan Kampung Ambai II Distrik Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut :

1. Peran Kepala Kampung dalam melaksanakan tertib administrasi di Kampung Ambai II tidak terlaksana dengan baik, dan kewenangan yang dimiliki kepala kampung, tidak dilaksanakan secara nyata bagi masyarakat Kampung Ambai II
2. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kampung Ambai II belum didukung oleh hal – hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kerjasama antar sesama perangkat kampung kurangnya, ketersediaan sarana dan prasarana kampung, dan kualitas sumber daya aparat kampung yang belum memadai.
3. Proses Pelayanan dibidang administrasi surat-menyurat tetap dilaksanakan oleh tiap-tiap kepala urusan yang ada di kantor kampung diantaranya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kartu Tanda Penduduk, Ijin Mendirikan Bangunan, Akte Kelahiran, Kartu

Keluarga, dan lain-lain, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Kampung untuk Melaksanakan apa yang menjadi hak masyarakat kampung karena Kepala Kampung selalu tidak berada ditempat.

## 2. Saran

1. Diperlukan optimalisasi peran kepala kampung dengan upaya maksimal untuk merangkul masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita – cita pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Kampung Ambai II,
2. Diharapkan Kepala Kampung harus selalu berada ditengah-tengah masyarakat dan mempunyai peran yang besar bagi masyarakat serta memberi ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya, dan untuk aparat Kepala Kampung tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan harmonis demi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat demi terciptanya pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung yang baik. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Kampung Ambai II yang masih tamatan SMA agar melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mengupayakan penguasaan ketrampilan yang handal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

- BPS,2013, *Distrik Dalam Angka Kepulauan Ambai*, Kabupaten Kepulauan Yapen.
- BPS, 2015, *Luas Wilayah Daratan dan Laut Berdasarkan Distrik*, Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meia Group, Jakarta.
- Mardikanto, T, 2015, *Pembangunan Masyarakat*, UNS, Press, Surakarta.
- Sahertian, Sahertian Aleda, 2015, *Teori Kepemimpinan*, Jakarta.
- Solekhan, Moch, 2015, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Sugiyono, 2013, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Suraddinata, Ermaya, 2012, *Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial*, Jakarta Suradinata,
- Ermaya, 2013, *Analisis Kepemimpinan*, Jatinangor.

### Undang - undang

- Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 *Tentang Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*.
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 *Mengenai Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen*, Provinsi Papua.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2015 *Mengenai Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah*.